

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad, D. (2018). *Metodologi Penelitian*.
- Arfandi, I. I. (2022). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. *Public Administration*, 820-833.
- Astri Tania Herlen, V. T. (2021). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 80-85.
- Creswell. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Dea Yulianti, N. (2021). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Meningkatkan transparansi keuangan negara pada KPPN Dumai. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 56-74.
- Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI . (2019, Agustus 09). Retrieved from Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI KPPN Surabaya 1: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/surabaya1/id/data-publikasi/berita-terbaru/2877-implementasi-kartu-kredit-pemerintah-kkp-dan-bank-garansi-satker-di-lingkup-pembayaran-kppn-surabaya-i.html>
- Dr. H. Tachjan, M. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W UNPAD.
- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. M. (2021). *Metode PEnelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Dr. Sahya Anggara, M. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Dr. Sahya Anggara, M. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.

Hardani, d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Hayat. (2019). *Kebijakan Publik*.

Hidayah, R. P. (2019). Studi Kasus Metode Penelitian Kualitatif.

Husna Rahma Dona, A. K. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 56-70.

Indonesia, B. (2014). *Elektronifikasi*. Retrieved from Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/elektronifikasi/default.aspx>

Indonesia, K. K. (21 pebruari 2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah*.

*Kemenkeu RI DJPb*. (2020, Juni 15). Retrieved from DJPb: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/data-publikasi/berita-terbaru/2880-mengenal-pejabat-perbendaharaan-mitra-kerja-kppn-bitung-sering-dilupakan,-hasil-kerjanya-di-rasakan.html>

Khoiron, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: LPSP.

Lesmana, B. (2018). *Kartu Kredit Pemerintah*. Retrieved from Model Baru Pengelolaan Keuangan Negara: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/kartu-kredit-pemerintah-modelbaru-pengelolaan-keuangan-negara/>, diakses 01/12/2021.

Mariana, D., Paskalina, C., & Yuningsih, N. Y. (2007). Perbandingan Pemerintahan. *Universitas Terbuka*, 10.

- Moshi, H. P. (2012). IMPLICATIONS OF CASH DOMINATED TRANSAKTIION FOR MONEY LAUNDERING. *INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES*, 1-7.
- PMK 62/PMK.05/2019. (2019). Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PML.05/2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id).
- PMK 178/PMK.05/2018. (2018). Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*
- PMK 196/PMK.05/2018. (2018). *Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Dengan.*
- PMK 210/PMK.05/2022, P. N. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tahun 2022. 1–32.*
- PMK 262/PMK.01/2016. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, 2–16.*
- PP No.50 Tahun, & 2018. (2018). *Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/99183/pp-no-50-tahun-2018>
- Rahel Melia Kurniadi, R. S. (2021). Tinjauan Atas Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Pada Satuan Kerja Di Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Credit Management In Public Office*, 83-88.
- Sriyani, I. K. (2022). Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura. 70-85.
- Sukmajati, M. (n.d.). *Metodologi Perbandingan Pemerintahan.* 1–49.

Suluh Hendrawan, N. A. (2019). Implementasi Transaksi Non Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik : Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 227-236.

Tera Novitasari, A. H. (2019). Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Magelang).

*UU No 1 Tahun 2004*. (2004). Tentang Perbendaharaan Negara.

*UU RI No. 17 Tahun 2003*. (2003). Tentang Keuangan Negara.

Wahyu Ira Cornellya, P. W. (2022). Melihat Lebih Dekat Praktik Akuntansi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada KPP Pratama Pare. *Jurnalku*, 341-357.

wijaya, E. S. (2018). *Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance)*. Semarang: Pustaka Magister.

Wijayanti, F. (2020). Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Sekaligus Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan Negara Melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 267-274.